



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah telah memasuki babak baru dalam kerangka pencapaian pembangunan jangka panjang daerah maupun nasional. Perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah memasuki tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kalimantan Tengah 2005-2025 akan menjadikan tonggak keberhasilan tahap sebelumnya dengan fokus pada permasalahan pokok yang masih harus diselesaikan dalam periode lima tahun mendatang. Perencanaan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 lebih menekankan pada pemantapan kemandirian dan ketahanan ekonomi sebagai dasar pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sehingga RKPD tahun 2017 menjadi sangat strategis dan diposisikan sebagai fundamentasi kebijakan untuk menopang kebijakan pembangunan tahun-tahun berikutnya.

Sebagai dokumen perencanaan jangka tahunan dalam perencanaan jangka menengah, RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 merupakan kelanjutan pembangunan pada tahun 2016 yang telah dilaksanakan. Agenda pembangunan sepanjang tahun 2016 merupakan tahap transisi antara periode sebelumnya dengan RPJMD 2016-2021. Dengan adanya evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan pada pembangunan periode sebelumnya, diharapkan pada tahun 2017 kebijakan dalam RKPD 2017 semakin tajam dan focus dengan kebijakan-kebijakan prioritas pembangunan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Prioritas pembangunan merupakan fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis yang melandasi atau berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Gubernur dalam RPJMD dari tahun ke tahun. Untuk itu, prioritas pembangunan terhubung dan merupakan arah kebijakan dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi acuan dan harus diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.



Penyusunan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan nasional;
3. memedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2017;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2017; serta
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Pembangunan suatu negara identik dengan persoalan pemerataan capaian pembangunan secara optimal dan berkualitas. Permasalahan inilah yang menjadi salah satu dasar bagi setiap pengambil kebijakan di pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan, penyempurnaan kebijakan, hingga revisi kebijakan agar dalam pembangunan nasional selalu mengalami peningkatan capaian kinerja. Perubahan kebijakan ini semakin nyata terlihat ketika pergantian presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia dimana setiap visi dan misi yang diembannya memiliki beberapa perbedaan dengan pendahulunya.

Perbedaan pandangan kebijakan ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan selama masih mengacu pada pokok pembangunan jangka panjang nasional utamanya sesuai peraturan perundang-undangan nasional yang masih berlaku. Meskipun begitu, dampak perubahan kebijakan ini memiliki berbagai sisi negatif maupun positif ketika dihierarki vertikal ke bawah yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karenanya, perlu adanya kajian dan analisa kembali terhadap kebijakan nasional sehingga mempermudah pemerintah daerah dalam merevisi dan merumuskan kembali berbagai dokumen perencanaan pembangunan.

Pada periode saat ini, Pemerintahan Republik Indonesia berada pada periode 2015-2019 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden dan



Wakil Presiden terpilih mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintahan nasional yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

TRISAKTI:

1. Kedaulatan dalam politik
2. Berdikari dalam ekonomi
3. Kepribadian dalam kebudayaan

Trisakti sebagaimana dijabarkan di atas merupakan modal dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, menjalankan, dan mengimplementasikan cita-cita kebangsaan Negara Republik Indonesia secara professional, konsekuen, dan berkesinambungan. Dalam realisasi pelaksanaan pembangunan nasional, **TRISAKTI** dijabarkan menjadi berbagai prioritas utama pada realisasi pembangunan nasional yang diuraikan secara umum sebagai berikut:

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global;
2. Memperkuat sistem pertahanan Negara;
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen Negara;
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi public;
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi;
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah;
8. Memberdayakan Desa;
9. Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat;
10. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan; dan
12. Berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI

1. Mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
2. Membangun kedaulatan Pangan berbasis pada Agribisnis Kerakyatan;
3. Dedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional;
4. Penguasaan sumber daya alam;
5. Membangun pemberdayaan Buruh;



6. Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional;
7. Penguatan investasi sumber domestic;
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara;
9. Penguatan infrastuktur;
10. Pembangunan ekonomi maritim;
11. Melakukan penguatan sektor kehutanan;
12. Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkeberlanjutan;
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan;
14. Membangun karakter dan potensi pariwisata;
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional; dan
16. Pengembangan industri manufaktur.

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN

1. Mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa;
2. Memperteguh ke-bhineka-an Indonesia dan memperkuat restorasi sosial;
3. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga;

Ketiga amanat Trisakti ini secara terintegrasi akan memberikan suatu motivasi utuh kepada setiap pelaksana sektoral pemerintahan pusat maupun daerah demi menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional juga dirumuskan Visi, Misi, dan agenda-agenda prioritas. Hal ini juga diwujudkan dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai harapan serta tercapai target yang diinginkan. Berikut Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas pembangunan nasional periode 2015-2019:

VISI:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

MISI:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;



3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA** yang rinciannya sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam menyusun RKP Kalimantan Tengah tahun 2017 ini selain harus memedomani dokumen perencanaan RPJMN dan RPJPD dan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021, tetapi juga harus merujuk pada dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2017. Hal ini dikarenakan, RKP merupakan penjabaran dari RPJMN yang memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang lebih spesifik daripada RPJMN.

RKP Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, yang memuat sasaran, arah kebijakan dan



strategi pembangunan. Penyusunan RKP tahun 2017 dilaksanakan dengan pendekatan **Holistik-Tematik, Intergratif dan Spasial**, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan **money follows program**, dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Tema RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK
MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN
DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH**

Sesuai dengan Tema RKP 2017 tersebut, maka sasaran pembangunan nasional tahun 2017 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen;
2. Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen;
3. Angka kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;
4. Laju inflasi 4,0;
5. Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,38;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita sebagaimana tersebut di atas.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama, yakni: (1) norma pokok kabinet pembangunan kerja; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu; serta (4) *quick wins* dan program lanjutan lainnya. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2017.



Dalam kaitan itu, **Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017** terdiri dari:

1. **Pembangunan Manusia dan Masyarakat**, meliputi:
 - a. **Revolusi Mental**, dengan program prioritas:
 - 1) reformasi birokrasi pemerintahan;
 - 2) penegakan hukum dan kelembagaan politik;
 - 3) kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa;
 - 4) peneguhan jati diri dan karakter bangsa;
 - 5) daya rekat sosial dalam kemajemukan;
 - b. **Kesehatan**, dengan program prioritas:
 - 1) penguatan upaya promotif dan preventif: “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”;
 - 2) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - 3) perbaikan gizi masyarakat;
 - 4) peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - c. **Pendidikan**, dengan program prioritas:
 - 1) penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata;
 - 2) peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
 - 3) penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;
 - 4) pengembangan pembelajaran yang berkualitas;
 - 5) peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter;
 - 6) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas;
 - 7) penguatan kelembagaan perguruan tinggi;
 - 8) peningkatan kapasitas IPTEK, inovasi dan daya saing perguruan tinggi;
 - 9) peningkatan relevansi pendidikan
 - d. **Perumahan dan Permukiman**, dengan program prioritas:
 - 1) fasilitasi penyediaan hunian layak baru;
 - 2) fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh);
 - 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi;
 - 4) peningkatan ketersediaan air baku.
2. **Pembangunan Sektor Unggulan**, meliputi:
 - a. **Kedaulatan Pangan**, dengan program prioritas:
 - 1) peningkatan mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
 - 2) peningkatan produksi padi dan pangan lain;
 - 3) kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat;
 - 4) penanganan gangguan terhadap produksi pangan
 - b. **Kemaritiman dan Kelautan**, dengan program prioritas:
 - 1) konektivitas (tol) laut dan industri maritim;



- 2) industri perikanan dan hasil laut;
 - 3) tata ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut serta wisata bahari;
 - 4) kesejahteraan nelayan, pembudidayaan ikan dan petambak garam;
 - 5) penanggulangan dan penyelesaian UU *Fishing* dan keamanan laut;
 - 6) penetapan batas laut, penamaan pulau dan pengelolaan pulau-pulau kecil
- c. **Kedaulatan energi**, dengan program prioritas:
- 1) peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi;
 - 2) peningkatan aksesibilitas energi;
 - 3) pengembangan cadangan energi;
 - 4) penyediaan energi primer;
 - 5) efisiensi dan konservasi energi;
 - 6) pengelolaan subsidi energi yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran
- d. **Pembangunan pariwisata**, dengan program prioritas:
- 1) promosi wisata Indonesia;
 - 2) pengembangan 10 destinasi wisata;
 - 3) SDM dan kelembagaan pariwisata;
 - 4) layanan kemudahan wisman masuk;
 - 5) penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat;
 - 6) jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata
- e. **Kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**, dengan program prioritas:
- 1) pengembangan kawasan industri/KEK;
 - 2) penumbuhan populasi industri;
 - 3) penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif;
 - 4) SDM industri yang kompeten dan disiplin;
 - 5) produktivitas dan daya saing industri;
 - 6) ketersediaan infrastruktur dan energi;
 - 7) ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri;
 - 8) hubungan industrial yang harmonis;
 - 9) pemberian insentif fiskal yang harmonis;
 - 10) pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif
3. **Pemerataan dan Kewilayahan**, meliputi:
- a. **Antar Kelompok Pendapatan**, dengan program prioritas:
- 1) penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja;
 - 2) perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - 3) pengembangan kewirausahaan;
 - 4) perkuatan basis perekonomian perdesaan;
 - 5) perluasan pelayanan dasar;
 - 6) pengurangan beban penduduk miskin dan rentan



- b. **Reforma Agraria**, dengan program prioritas:
 - 1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik;
 - 2) penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria (TORA);
 - 3) kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria (TORA);
 - 4) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA;
 - 5) kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah;
- c. **Daerah Perbatasan**, dengan program prioritas:
 - 1) pembangunan PLBN terpadu;
 - 2) pembangunan 10 PKS N sebagai pusat pengembangan perbatasan negara;
 - 3) membuka isolasi Lokpri, peningkatan sarpras, peningkatan SDM dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku;
 - 4) pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara;
 - 5) peningkatan kualitas diplomasi, kerjasama sosial-ekonomi
- d. **Daerah Tertinggal**, dengan program prioritas:
 - 1) pengembangan ekonomi lokal;
 - 2) peningkatan aksesibilitas;
 - 3) pemenuhan pelayanan dasar publik;
 - 4) peningkatan SDM dan IPTEK
- e. **Desa dan Kawasan Perdesaan**, dengan program prioritas:
 - 1) pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) di desa termasuk kawasan transmigrasi;
 - 2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa di kawasan transmigrasi;
 - 3) pembangunan SDM, pemberdayaan dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;
 - 4) penguatan pemerintahan desa;
 - 5) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
 - 6) pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota;
 - 7) pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan
- f. **Perkotaan**, dengan program prioritas:
 - 1) mewujudkan sistem perkotaan;
 - 2) pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP);
 - 3) mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;
 - 4) mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK;
 - 5) meningkatkan kapasitas pengelolaan kota



- g. **Konektivitas**, dengan program prioritas:
- 1) pembangunan dan pengembangan transportasi laut;
 - 2) pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah;
 - 3) pembangunan dan pengembangan kapasitas bandara pengumpul dan pengumpan;
 - 4) pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran;
 - 5) pembangunan dan pengembangan transportasi perkerataapian;
 - 6) pembangunan dan pengembangan jaringan sabuk penyeberangan serta angkutan sungai dan danau (*Inland Waterway*);
 - 7) pembangunan dan pengembangan transportasi masal dan perkotaan;
 - 8) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi
4. **Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan**, meliputi:
- a. **Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum**, terdiri dari:
- 1) Reformasi regulasi, dengan program prioritas:
 - a) otonomi daerah;
 - b) perizinan dan investasi;
 - c) penataan ruang;
 - 2) Kepastian dan penegakan hukum, dengan program prioritas:
 - a) penegakan hukum yang berkualitas;
 - b) pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif;
 - c) penghormatasn, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
- b. **Stabilitas keamanan dan ketertiban**, dengan program prioritas:
- 1) deteksi dini dan bebas ancaman terorisme;
 - 2) keselamatan dan keamanan laut yang terkendali;
 - 3) lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba;
 - 4) pelayanan prima kepolisian;
 - 5) postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman;
 - 6) keamanan data dan informasi (keamanan cyber)
- c. **Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi**, dengan program prioritas:
- 1) penguatan lembaga demokrasi;
 - 2) peningkatan akses dan kualitas informasi publik;
 - 3) pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik;
 - 4) pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme;
 - 5) pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan;
 - 6) perlindungan WNI/BHI di luar negeri;
 - 7) penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan;
 - 8) pemantapan peran di ASEAN;



- 9) penguatan diplomasi *soft power*.
- d. **Reformasi birokrasi**, dengan program prioritas:
 - 1) pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 - 2) penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan;
 - 3) peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.
5. **Pembangunan Ekonomi**, meliputi:
 - a. **perbaiki iklim investasi dan iklim usaha**, dengan program prioritas:
 - 1) peningkatan kemudahan berusaha;
 - 2) pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah;
 - 3) pengembangan layanan perizinan terpadu;
 - 4) peningkatan persaingan usaha yang sehat;
 - 5) percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi;
 - 6) membenahi iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis;
 - 7) pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis.
 - b. **Peningkatan ekspor non migas**, terdiri dari:
 - 1) Sisi produksi, dengan program prioritas:
 - a) peningkatan kualitas dan standar produk ekspor;
 - b) peningkatan realisasi investasi berorientasi ekspor;
 - c) peningkatan ekspor produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d) pengembangan industri pengolah sumber daya alam berorientasi ekspor;
 - 2) Sisi permintaan, dengan program prioritas:
 - a) pengembangan fasilitas ekspor;
 - b) peningkatan efektivitas kerjasama perdagangan internasional (*market access*);
 - c) penguatan *market intelligence*, promosi dan asistensi ekspor.
 - c. **Reformasi fiskal**, terdiri dari:
 - 1) pengoptimalan pendapatan negara, dengan program prioritas:
 - a) pengoptimalan perpajakan;
 - b) dukungan regulasi;
 - c) pengoptimalan PNBPN;
 - d) penguatan institusi
 - 2) peningkatan kualitas belanja negara, dengan program prioritas:
 - a) perbaikan pelaksanaan anggaran;
 - b) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif;
 - c) peningkatan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah dan dana desa;
 - d) belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran



Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan pembangunan nasional harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Berkenaan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan tahun 2017 akan mengakomodir setiap revisi dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang telah direvisi dan disesuaikan dengan kebijakan nasional. Hal ini dilakukan karena pada masa penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, masih menggunakan kebijakan pembangunan nasional presiden terdahulu, sehingga untuk meng-up date setiap arahan pemerintah pusat perlu dilakukan revisi.

Dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah harus mengimplementasikan kebijakan nasional, sehingga secara eksplisit Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus melaksanakan berbagai penyempurnaan dan revisi kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, pada rumusan arah kebijakan (program dan prioritas) perencanaan pembangunan tahun 2017 telah dilakukan penajaman arah kebijakan untuk disesuaikan dan diintegrasikan dengan kebijakan nasional dengan tetap membawa karakteristik daerah sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan. Berikut penajaman prioritas pembangunan daerah tahun 2017 yang merupakan turunan dari penajaman priroitas pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Tabel 4.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No	Agenda Nawacita	(Bidang) Prioritas Pembangunan Nasional (RKP Tahun 2017)	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Cita 5)	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Perumahan dan Permukiman	1. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
2.	Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (Cita 6)	4. Kedaulatan pangan 5. Kedaulatan energi 6. Antar kelompok pendapatan	2. Pengelolaan SDA secara bijaksana dan berkelanjutan 3. Peningkatan pendapatan masyarakat



No	Agenda Nawacita	(Bidang) Prioritas Pembangunan Nasional (RKP Tahun 2017)	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
1	2	3	4
3.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik (Cita 7)	7. Percepatan pertumbuhan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 8. Perbaiki iklim investasi. 9. Peningkatan ekspor non migas. 10. Pembangunan Pariwisata.	4. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD 5. Stabilitas ekonomi daerah 6. Pengelolaan industri pariwisata
4.	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan (Cita 3)	11. Kemaritiman dan kelautan 12. Reformasi agraria 13. Desa dan kawasan perdesaan 14. Perkotaan 15. Daerah Tertinggal 16. Konektivitas	7. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pantai 8. peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah 9. Pemerataan aksesibilitas wilayah
5.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (Cita 4)	17. Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum	10. Peningkatan kualitas pengawasan dan administrasi pengelolaan keuangan daerah
6.	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara (Cita 1)	18. Stabilitas keamanan dan ketertiban 19. Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi	11. Optimalisasi kinerja



No	Agenda Nawacita	(Bidang) Prioritas Pembangunan Nasional (RKP Tahun 2017)	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
1	2	3	4
7.	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (Cita 2)	20. Reformasi birokrasi	12. Reformasi Birokrasi
8.	Melakukan revolusi karakter bangsa (Cita 8)	21. Revolusi mental	
9.	Memperteguh ke-Bhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Cita 9)		

4.2 Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019

Keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pencapaian pembangunan-pembangunan di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi modal dasar dan kekuatan utama bangsa dalam membangun kemajuan dan kemandirian. Terkait hal tersebut, pengembangan wilayah menjadi cukup penting dan fundamental dalam mengoptimalkan setiap potensi daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang berkualitas dan merata.

Pengembangan setiap wilayah di Negara Republik Indonesia ini tergambar jelas pada misi pembangunan jangka menengah nasional dan dipertegas melalui agenda prioritas NAWA CITA yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah. Isu utama dalam pembangunan kewilayahan adalah kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait pengembangan wilayah akan difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah kawasan timur Indonesia, dimana salah satunya adalah wilayah Kalimantan.



Sebagai bagian dari wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki berbagai potensi sumber daya yang strategis dan berkualitas untuk menunjang pengembangan wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, penjabaran tema pengembangan wilayah Kalimantan menjadi penting untuk dikaji agar mengetahui seberapa besar porsi pembangunan Kalimantan Tengah dalam kancah pembangunan nasional. Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan ini akan menjadi salah satu isu strategis untuk penyempurnaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar terintegrasi dan saling mendukung antara pembangunan nasional dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut tema besar “Pembangunan Wilayah Kalimantan” sebagai bentuk dukungan pencapaian pembangunan nasional.

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

J **Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan**

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.



2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,85 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,06 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,75.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimantan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan.
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
7. **Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan** adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45 persen untuk propinsi dan 10 persen untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya penggunaan *block grant* (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen



pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100 persen; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70 persen; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah)

8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat yang dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di Wilayah Pulau Kalimantan.

Berdasarkan penjabaran sasaran pembangunan wilayah Kalimantan diatas serta mempertimbangkan potensi dan sumber daya daerah maka target pembangunanyang merupakan prioritas nasional serta prioritas daerah terdapat tiga sasaran yang tersaji pada tabel berikut.



Tabel 4.2
Target Kalimantan Tengah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019

No	Sasaran Nasional	Target Kalimantan Tengah dalam RPJM 2015-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,1	7,0	7,5	8,2	8,7
2	Tingkat Kemiskinan	6,0	5,8	5,3	4,8	4,3
3	Tingkat Pengangguran	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2

Sumber: RPJMN Tahun 2015-2019

Jika menyandingkan target RPJM Nasional untuk Kalimantan Tengah pada tahun 2017 dengan target pada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, terdapat beberapa perbedaan pandangan target yang terjelaskan melalui fenomena maupun data dan informasi. Perbedaan tersebut adalah capaian target pembangunan pada bidang ekonomi yang diindikasikan melalui pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah akan sulit mencapai target nasional dikarenakan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang cukup tinggi dan sektor tersebut mulai mengalami keguncangan produksi maupun pemasaran.

Disisi lain, target nasional pada indikator tingkat kemiskinan dapat diadopsi dikarenakan pada beberapa tahun terakhir memiliki pola yang serupa dan sesuai dengan target nasional 2015-2019. Sebaliknya untuk tingkat pengangguran, perlu adanya kajian ulang untuk menentukan target mengingat pada tahun terakhir angka pengangguran meningkat cukup tajam dan hal tersebut akan menjadi bahan analisa yang penting dalam merumuskan target pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut sasaran target nasional dan target Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017.

Tabel 4.3
Sasaran Target Nasional dan Target Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No.	Sasaran	Target Tahun 2017	
		Nasional (RKP 2017)	Provinsi Kalimantan Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,1	7,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,5	5,12
3	Tingkat Pengangguran (%)	5,0-5,3	2,4
4.	Laju inflasi (%)	4,0	3,5-4,5



4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

Prioritas pembangunan merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang telah ditetapkan dan menjadi tonggak capaian menuju target sasaran 5 (lima) tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Prioritas pembangunan yang dirumuskan pada perencanaan jangka menengah akan menjadi dasar bagi penyelesaian setiap permasalahan di daerah. Oleh karenanya, perlu adanya integrasi dan sinkronisasi setiap dokumen perencanaan antar periode maupun antar hierarki pemerintah sebagai benang merah agar arah pembangunan tetap berada pada koridor yang sama.

Prioritas pembangunan daerah berisikan program dan kegiatan unggulan SKPD dengan skala prioritas paling tinggi (*output&outcome*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan tahun realisasi perencanaan. Dalam menentukan prioritas pembangunan, perlu adanya identifikasi permasalahan pembangunan yang bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya, melalui identifikasi permasalahan akan diketahui faktor penyebab atau pemicu permasalahan secara internal maupun eksternal sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan langkah taktis yakni menyusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program-program prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran dan identifikasi permasalahan terkait dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

4.3.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Prioritas dan sasaran diturunkan melalui rumusan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi baik dari eksternal (nasional dan wilayah sekitarnya) serta internal (dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang lain). Oleh karena itu, keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah menjadi penting. Hal ini mengingat kerangka kerja yang disusun dalam RPJMD merupakan hierarki pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Gubernur Kalimantan Tengah.

Perwujudan prioritas pembangunan harus dipilih sedemikian rupa agar dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMD dapat seoptimal mungkin mencapai target-target kinerja pembangunan khususnya indikator kinerja pembangunan sesuai yang telah disepakati. Secara harfiah perlu dipahami bahwa prioritas pembangunan daerah merupakan agenda



pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang secara langsung terkait dalam pencapaian target RPJMD melalui rencana program dan kegiatan. Sedangkan, rencana program dan kegiatan merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas.

Terkait hal tersebut, dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017. Oleh karena itu, perlu disusun kriteria khusus yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2017.
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*.
3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan nasional dan provinsi.
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual akan dihadapi pada tahun 2017.
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 merupakan **penjabaran tahun ke dua** dari **RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021**. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPJMD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2017.



Tujuan dan sasaran RKPД Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- **Tujuan 1: Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas**

Setiap pembangunan daerah memiliki suatu perencanaan pengembangan berbagai infrastruktur wilayah dimana pengembangan tersebut memiliki sebuah konsep yang dirumuskan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Positif negatifnya hasil pembangunan infrastruktur wilayah tergantung dari optimalisasi pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah yang telah dirumuskan sedemikian rupa untuk mengiringi pembangunan daerah. Konsep tata ruang yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi pilihan bagi setiap daerah untuk menunjukkan perhatian pemerintah akan keharmonisan dan keasrian lingkungan sebagai pendukung kesejahteraan masyarakat.

Kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas dengan setiap tahapan pembangunan infrastruktur wilayah baik perhubungan, sanitasi, perijinan gedung, hingga taman maupun *landscape* akan memberikan dorongan lebih bagi pencapaian tujuan pembangunan utamanya dalam memberi kenyamanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting kiranya kesesuaian realisasi dan perencanaan tata ruang wilayah agar optimalisasi pembangunan daerah dapat ditingkatkan tanpa memberikan dampak negatif pada beberapa aspek spasial wilayah.

Guna mewujudkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai berupa **Terealisasinya perencanaan tata ruang wilayah secara konsisten, dengan persentase kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah dan pembangunan daerah sebesar 50% pada tahun 2017.**

- **Tujuan 2: Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas**

Rumusan perencanaan tata ruang wilayah yang berkualitas akan memberikan kontribusi yang signifikan pada pencapaian pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itulah, dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya capaian optimalisasi pembangunan infrastruktur utamanya dalam aksesibilitas wilayah, pemerataan listrik dan air, hingga kelayakan pemukiman penduduk Provinsi Kalimantan Tengah.

Infrastruktur dasar merupakan fasilitas dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan hal ini, infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik dan layak. Melihat pentingnya insfrastruktur dasar maka hal ini sangat mempengaruhi



kehidupan, salah satunya dapat terkait dengan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar sering dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya.

Diharapkan, dengan adanya peningkatan infrastruktur akan menjadi daya dorong positif bagi pemerataan hasil pembangunan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh segenap masyarakat Kalimantan Tengah tanpa terkecuali. Guna mewujudkan peningkatan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat, maka sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai tahun 2017 adalah:

1. Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik/mantap 100%
2. Meningkatnya pemenuhan energi listrik ke seluruh wilayah, dengan Rasio Elektrifikasi sebesar 75% , rasio desa berlistrik sebesar 85%
3. Meningkatnya pemerataan pembangunan, dengan Indeks Gini sebesar 0,300.

- **Tujuan 3: Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai**

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki garis pantai sepanjang 750 km yang terbentang dari Kabupaten Kapuas sampai Kabupaten Sukamara. Cukup panjangnya daerah pesisir dan pantai di Kalimantan Tengah menjadikan strata wilayah ini memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah mengingat wilayah pesisir pantai identik dengan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai perlu adanya pergerakan perekonomian yang stabil dan konsisten baik melalui peningkatan perekonomian di sektor pertanian (perikanan) maupun dari sektor pariwisata.

Peningkatan pembangunan daerah pesisir dan pantai harus memiliki integrasi dengan pembangunan infrastruktur wilayah utamanya dari segi aksesibilitas. Hal ini menjadi perlu untuk meningkatkan kestabilan arus komoditas barang/jasa maupun arus penduduk sebagai subyek pembangunan daerah pesisir dan pantai. Guna mewujudkan tujuan pembangunan wilayah pesisir dan pantai maka perlu adanya pencapaian sasaran **Meningkatnya kesejahteraan nelayan, dengan Nilai Tukar nelayan sebesar 105,51 pada tahun 2017.**

- **Tujuan 4: Meningkatkan kualitas perekonomian daerah**

Sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan, kualitas perekonomian daerah menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing



ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Berbagai rumusan program dan kegiatan dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Dalam perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya.

Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam realisasi perwujudan peningkatan kualitas ekonomi daerah, maka sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang harus dicapai adalah:

1. **Meningkatnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, dengan nilai indikator sasaran pada tahun 2017, laju Inflasi sebesar sebesar 3,5-4,5 persen**
2. **Meningkatnya pemerataan kesejahteraan, dengan nilai indikator sasaran pada tahun 2017:**
 - a. **Tingkat Kemiskinan sebesar 5,12 persen;**
 - b. **Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,6 persen.**

- **Tujuan 5: Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten**

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Hal ini dikarenakan masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat yang mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau berbasis teknologi informasi global. Pentingnya penerapan teknologi juga mengindikasikan peningkatan efisiensi sektor perekonomian dalam meningkatkan nilai tambah maupun inovasi guna mewujudkan perekonomian berkualitas. Terkait hal tersebut, realisasi tujuan pembangunan memerlukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:



1. **Meningkatnya sektor ekonomi hijau, dengan Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB sebesar 23,5 persen;**
2. **Meningkatnya perekonomian kreatif masyarakat, dengan indikator sasaran pada tahun 2017:**
 - a. **Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 18 persen**
 - b. **Tingkat Pengangguran sebesar 2,4 persen**

- **Tujuan 6: Meningkatkan profesionalitas birokrasi secara menyeluruh**

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan hukum maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam mewujudkan *good governance* diperlukan peran masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan masyarakat berpartisipasi aktif maka segala hal/tindakan yang berindikasi negative dapat dicegah atau diatasi.

Selanjutnya dalam mewujudkan profesionalitas birokrasi secara menyeluruh diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. **Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan salah satu indikatornya adalah Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**
2. **Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 78 (baik);**
3. **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 70 (Baik)**

- **Tujuan 7: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh**

Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai peranan kunci dalam menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia sendiri diukur melalui tiga komponen yakni kualitas pendidikan,



kualitas pelayanan kesehatan, maupun kesejahteraan perekonomian masyarakat. Ketiga hal tersebut dirumuskan dalam indeks pembangunan manusia yang dapat memberikan analisa maupun kajian keterbandingan kualitas pembangunan sumber daya manusia antar wilayah dan antar waktu.

Dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Berbagai rumusan program dan kegiatan pembangunan strategis untuk peningkatan kualitas pendidikan direalisasikan agar masyarakat memperoleh pendidikan yang layak. Dengan hal ini, kita diharapkan mampu meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Peningkatan SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan hal ini, maka pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. Program pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan semaksimal dan seoptimal mungkin agar peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan dan menikmati hasil pembangunan daerah dapat terwujud.

Guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dengan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,2 tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah selama 12 tahun;**
- 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan Angka Harapan Hidup selama 72 tahun.**

- Tujuan 8: Meningkatkan kontribusi Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang selain meningkatkan pendapatan asli daerah juga meningkatkan pergerakan perekonomian kerakyatan utamanya usaha kecil dan menengah yang berada di masyarakat. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak dan beranekaragam obyek wisata dimana masih memerlukan pengelolaan yang professional dan aksesibilitas yang murah dan mudah. Guna mewujudkan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, maka sasaran pembangunan



yang harus dicapai adalah **Meningkatnya kunjungan wisatawan, dengan target Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun 2017 sebanyak 390.000 wisatawan**, baik dalam negeri maupun mancanegara.

- **Tujuan 9: Meningkatkan lingkungan yang nyaman, asri, dan layak huni**

Lingkungan hidup merupakan suatu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan melestarikan lingkungan hidup maka pembangunan daerah diharapkan akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukung lingkungannya. Hal tersebut akan berdampak pada berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral karena menjadi pendukung penuh dalam usaha sektor kehutanan, sektor perkebunan, sektor pertanian, dan pertambangan yang merupakan salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah. Namun demikian pendayagunaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Guna mewujudkan peningkatan lingkungan yang nyaman, asri, dan layak huni, maka sasaran yang harus dicapai dalam pembangunan daerah tahun 2017 adalah **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar**

- **Tujuan 10: Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan**

Pembangunan daerah merupakan satuan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan pada berbagai bidang. Program dan kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan dana pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana salah satunya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah ini memegang peranan yang penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan karena melalui PAD dapat dilihat sejauh mana Provinsi Kalimantan Tengah dapat membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah.

Guna mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, maka sasaran yang harus dicapai adalah **Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan persentase PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 45 persen.**



Tabel 4.4
Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

Visi: KALTENG MAJU, MANDIRI DAN ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH DAN HARMONIS)				
Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2015	Target 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1: Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi				
Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas	Terealisasinya perencanaan tata ruang wilayah secara konsisten	Persentase Kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah dengan pembangunan daerah	-	50%
Misi 2: Pengelolaan Infrastruktur				
Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pemenuhan energi listrik ke seluruh wilayah	Rasio Elektrifikasi	70,2%	75%
	Meningkatnya pemerataan pembangunan	Indeks Gini	0,317	0,300
Misi 3: Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, & Pantai				
Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,85	105,51
Misi 4: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan				
Meningkatkan kualitas perekonomian daerah	Meningkatnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan	Laju Inflasi	4,74%	3,5% - 4,5%
	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	5,91%	5,12%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,01%	7,6%
Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten	Meningkatnya sektor ekonomi hijau	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	22,84%	23,5%
	Meningkatnya perekonomian kreatif masyarakat	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	16,15%	18%
		Tingkat Pengangguran	4,54%	2,4%
Misi 5: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah				
Meningkatkan profesionalitas birokrasi secara menyeluruh	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK	WTP	



Visi: KALTENG MAJU, MANDIRI DAN ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH DAN HARMONIS)				
Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2015	Target 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	61 (Baik)	70 (Baik)
Misi 7: Pendidikan, Kesehatan & Pariwisata				
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	8,17 tahun	8,2 tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah	11,93 tahun *)	12 tahun
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,54 tahun	72 tahun
Meningkatkan kontribusi Sektor Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	373.610 orang	390.000 orang
Misi 7: Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam				
Meningkatkan lingkungan yang nyaman, asri, dan layak huni	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
Misi 8: Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah	36%	45%

Keterangan: *) : data tahun 2014

4.3.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

Periode RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2017 berada pada masa tahun kedua RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Dokumen RKPD merupakan tahapan/langkah pelaksanaan dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah, dimana dalam penyusunan RKPD tahun 2017 beriringan dengan penyusunan dokumen RPJMD. Oleh karenanya, tema atau agenda pembangunan tahun 2017 ini menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021.



Dengan pertimbangan tersebut, maka dirumuskan tema atau agenda pembangunan RKPD Kalimantan Tengah tahun 2017 adalah:

“MEMACU PEMERATAAN DAN PENGUATAN PERGERAKAN PEREKONOMIAN DAERAH”

Selanjutnya agar dokumen RKPD tahun 2017 sinkron dan selaras dengan dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah yang lain serta bersinergi dengan RKPD tahun-tahun sebelumnya, maka dalam penyusunan RKPD tahun 2017 perlu memperhatikan:

- a. Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2010-2015 yang belum tercapai;
- b. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan tahun 2017;
- c. Identifikasi target-target pembangunan RKPD tahun 2015 yang belum tercapai;
- d. Identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional (RKP Tahun 2017);
- e. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Prioritas pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 telah diselaraskan dan mengacu pada strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017, prioritas pembangunan dalam penyusunan RKPD 2017 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	
(1)		(2)		(3)	
1	Terealisasinya perencanaan tata ruang wilayah secara konsisten	1	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	1	Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang
2	Meningkatnya pemenuhan energi listrik ke seluruh wilayah	2	Pemerataan aksesibilitas wilayah	2	Peningkatan sarana prasarana pendukung infrastruktur dasar
3	Meningkatnya pemerataan pembangunan			3	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
				4	Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/kota yang layak
4	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	3	peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pantai	5	Pengembangan potensi perikanan
5	Meningkatnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan	4	Stabilitas Ekonomi Daerah	6	Peningkatan daya beli masyarakat
				7	Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan



Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	
(1)		(2)		(3)	
6	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat			8	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
				9	Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah
				10	Pengembangan investasi baik usaha industri kecil maupun besar
7	Meningkatnya sektor ekonomi hijau	5	Peningkatan pendapatan masyarakat	11	Peningkatan produktivitas pada setiap subsektor pertanian
8	Meningkatnya perekonomian kreatif masyarakat			12	Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta
				13	Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu
				14	Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian
				15	Merasionalkan harga-harga bahan pokok
9	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	6	Peningkatan kualitas pengawasan dan administrasi pengelolaan keuangan daerah	16	Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik
		7	Reformasi Birokrasi	17	Persiapan SDM aparatur pelaksana pemerintahan
10	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	8	Optimalisasi kinerja aparatur	18	peningkatan keamanan, keadilan, dan kenyamanan dalam berkehidupan
11	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan				
12	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	9	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	19	Optimalisasi manajemen pendidikan
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			20	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
				21	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
				22	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
				23	Peningkatan kualitas dokter dan paramedis



Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	
(1)		(2)		(3)	
14	Meningkatnya kunjungan wisatawan	10	Pengelolaan industri pariwisata	24	Pengembangan objek-objek pariwisata
				25	Pengadaan pendidikan kepariwisataan
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	11	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan	26	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
				27	Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis
				28	Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan
				29	Reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan
16	Meningkatnya pendapatan asli daerah	12	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	30	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah

Dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan di atas serta dalam rangka mewujudkan pembangunan yang mampu menyejahterakan masyarakat, maka optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan tahunan merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi segala kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya perhatian pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan kerja tahunan lebih ditingkatkan.

Dengan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka tema untuk RKPD 2017 telah ditetapkan, yakni: **“Memacu Pemerataan dan Penguatan Pergerakan Perekonomian Daerah”** yang selanjutnya tema tersebut dijabarkan dalam Program Prioritas Pembangunan pada tabel berikut.



Tabel 4.6
Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Data awal (2015)	Target 2017	SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	1. Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang	Program pembangunan daerah berbasis perencanaan tata ruang wilayah provinsi	Jumlah proyek pembangunan yang sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah provinsi			Dinas PU
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Luas kawasan perumahan yang tertata			Dinas PU
			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Presentase perencanaan pengembangan kab/kota			Dinas PU
2	Pemerataan aksesibilitas wilayah	2. Peningkatan sarana prasarana pendukung infrastruktur dasar	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Kapasitas air baku (L/detik)	300,107	154,225	Dinas PU
			Program lingkungan sehat perumahan	Jumlah Kab/kota memenuhi tatanan wilayah sehat	15%	25%	Dinas Kesehatan
			Program pengembangan listrik dan pemanfaatan energi	Jumlah pelanggan pengguna listrik	478.124	518.236	Distamben
			Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	- Rasio Elektrifikasi (%) - Jumlah dan prosentase desa berlistrik	70,2 80,3	75 85	Distamben
		3. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi	Program pembangunan jalan dan jembatan	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)	2,00	2,31	Dinas PU
				Tingkat Kemantapan jalan (%)	87,52	100	Dinas PU
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Panjang Jalan kereta yang dibangun	-	435 km	DISHUB
				Panjang sandaran dermaga	91 dermaga	91 dermaga	DISHUB



Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Data awal (2015)	Target 2017	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/kota yang layak	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi	7,30% 10 kecamatan	0%	DISHUB
			Terselenggaranya pelayanan Angkutan	93%	96%	DISHUB
		Program pengawasan dan monitoring kualitas infrastruktur perhubungan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	52,76%	65%	Dinas PU
3	peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pantai	Program pemberdayaan potensi sumber daya air, maupun wilayah pesisir dan pantai	Persentase sarana dan prasarana kebutuhan nelayan	-	-	Dislutkan
		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah nelayan yang mendapat bantuan modal	-	-	Dislutkan
		Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Jumlah kawasan perikanan	1	2	Dislutkan
4	Stabilitas Ekonomi Daerah	6. Peningkatan daya beli masyarakat	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rasio pasar per 10.000 penduduk	-	-
			Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah jenis produk/barang beredar yang diawasi di pasar/pertokoan	400	450
	7. Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan	Program penanggulangan kemiskinan bidang sarana dan prasarana bidang pemukiman	Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat			Dinas PU
		Program perlindungan sosial masyarakat sangat miskin	Jumlah rumah tangga penerima bantuan perlindungan sosial	83.301	8.867	Dinsos



Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Data awal (2015)	Target 2017	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Rasio Kesenjangan Kemiskinan)	1,018	0,886	Dinsos
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (%)			Dinas Kesehatan
	8. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah	-	5	Disperindag
		Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)	-	5	Disperindag
	9. Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Volume Usaha kawasan industri (Triliun)	-	-	Disperindag
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor	2 IKM	4 IKM	Disperindag
	10. Pengembangan investasi baik usaha industri kecil maupun besar	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Realisasi Investasi (triliun)	74.20	17,24	BPMDP
			Nilai Persetujuan Investasi (Triliun)	144.26	17,24	BPMDP
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)	7 (Tujuh) Hari Kerja	7 (Tujuh) Hari Kerja	BPMDP



Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Data awal (2015)	Target 2017	SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	Peningkatan pendapatan masyarakat	11. Peningkatan produktivitas pada setiap subsektor pertanian	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Persentase penerapan teknologi tepat guna			Distannak
			Program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun kehutanan	Nilai PDRB subsektor pertanian tanaman pangan	2,33%		Distannak
		Nilai PDRB subsektor perkebunan		13,41%	13,4%	Disbun	
		Nilai PDRB subsektor peternakan		1,59%		Distannak	
		Nilai PDRB subsektor perikanan		2,59%	3,00%	Dislutkan	
		Nilai PDRB subsektor kehutanan		1,74%	1,74%	Dishut	
		12. Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan	22,16	25	Disnakertran
				Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)	29,33	50	Disnakertran
		13. Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran UMP (Rp.)	Rp.2.057.558	Rp. 2.357.563	Disnakertran
				Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah IKM baru yang mendapat pelatihan dan pendampingan modal	160	220
		14. Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha	-	5 %	Disperindag
				Program pemberdayaan setiap lapisan masyarakat dalam Usaha Kecil Menengah yang produktif	Jumlah IKM yang berhasil mengembangkan produk unggulan daerah	44	56



Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Data awal (2015)	Target 2017	SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)	-	10 unit	Diskop UMKM	
			Jumlah UKM unggulan yang mandiri dan berorientasi ekspor	-	10 unit	Diskop UMKM	
			Program pengembangan kewirausahaan kompetitif	Jumlah wirausaha baru (WUB)	5.164	5.746	Disperindag
		15. Merasionalkan harga-harga bahan pokok	Program peningkatan pelayanan angkutan	Kuantitas Komoditas dan Penumpang			Dishub
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Nilai Ekspor hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp. 235.818.480,66	Rp.235.818.480,66	Distannk Disbun
6	Peningkatan kualitas pengawasan dan administrasi pengelolaan keuangan daerah	16. Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik	Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	956	688	Inspektorat
				Menurunnya rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD	0,00148	0,00135	Inspektorat
				Meningkatnya nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	3	20	Inspektorat
				Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan komponen Laporan Keuangan	April	Maret	Inspektorat
					43%	45%	
				Meningkatnya rasio penyelesaian tindak lanjut	34%	25%	Inspektorat
		Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	1.593	1.120	Inspektorat	
			Rasio Temuan Kerugian Daerah dibandingkan APBD Kabupaten/Kota	0.0001814	0.00015	Inspektorat	



Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Data awal (2015)	Target 2017	SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	11	13	Inspektorat	
			Meningkatnya efektivitas penyelesaian Tindak Lanjut	54%	60%	Inspektorat	
			Program peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi	Meningkatnya rasio penanganan pengaduan masyarakat non pengadaan barang/jasa	91%	98%	Inspektorat
				Meningkatnya rasio penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa	91%	98%	Inspektorat
				Meningkatnya pelayanan konsultasi langsung kepada SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelompok Masyarakat	100%	100%	Inspektorat
7	Reformasi Birokrasi	17. Persiapan SDM aparatur pelaksana pemerintahan	Program pembinaan dan pengembangan aparatur			BKD	
			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			BKD	
			Program peningkatan pelayanan publik	77,23	78	Biro Organisasi	
8	Optimalisasi kinerja aparatur	18. peningkatan keamanan, keadilan, dan kenyamanan dalam berkehidupan	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	78% (33)	90% (31)	Satpol PP/ Kesbangpol	
			Program pendidikan politik masyarakat	79 *)	80	Badan Kesbangpol	



Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Data awal (2015)	Target 2017	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	19. Pengoptimasian manajemen pendidikan	Program Pendidikan non formal	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan	105 orang	-	Dinas Pendidikan
		20. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Program pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	68,60%	68,62%
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	99,26%	99,35%	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	117,60	117,65	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	85,61%	85,70%	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	96,15%	96,75%	Dinas Pendidikan
	Program pendidikan Luar biasa		Jumlah sekolah yang terpenuhi sarana dan prasarananya	65,25%	70,18%	Dinas Pendidikan
	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		Angka Melek Huruf	99,59	99,60	Dinas Pendidikan
	21. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Program upaya kesehatan masyarakat	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	79,50 %	85 %	Dinas Kesehatan
			Cakupan Puskesmas di setiap kab/kota			Dinas Kesehatan
		Program standarisasi pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	49	23	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Balita per 1000 KH	40	32	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	359	102	Dinas Kesehatan
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	12 %	100 %	Dinas Kesehatan	



Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Data awal (2015)	Target 2017	SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			Program peningkatan mutu rumah sakit	Status Akreditasi Rumah Sakit	Belum terakreditasi sesuai standar akreditasi RS terbaru	Terakreditasi paripurna	RSUD
		22. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Program peningkatan pembiayaan jaminan kesehatan	Jumlah Klaim Pasien miskin/kelas III gratis yang dilayani RS	3.022 klaim	3.175 klaim	Dinas Kesehatan
			Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kunjungan pasien di RSUD	150.049	150.000	Dinas Kesehatan RSUD
			Program pengembangan lingkungan sehat	Jumlah Kab/kota memenuhi tatanan wilayah sehat	15 %	25 %	Dinas Kesehatan
			Pogram obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	189,31%	100%	Dinas Kesehatan
		23. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM yang mengikuti pendidikan/pelatihan dan atau tugas belajar	80 orang	100 orang	BKD
			Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)			Dinas Kesehatan
				Jumlah kunjungan pasien di RSUD	150.049	150.000	RSUD
			Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat (%)			RSUD
		10	Pengelolaan industri pariwisata	24. Pengembangan objek-objek pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah wisatawan (orang)	373.610
25. Pengadaan pendidikan kepariwisataan	Program pengembangan kemitraan			Jumlah usaha pariwisata	143	143	Disbudpar



Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Data awal (2015)	Target 2017	SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan	26. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	5.094 Ha/35.468,66 Ha	6.094 Ha/45.555 Ha	BLH/Dishut
				Prosentase Penurunan Laju Kerusakan	87.298,40 Ha/4,59 %	77.298,4 Ha/3,61 %	BLH/Dishut
		27. Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis	Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah Emisi yang diturunkan	Emisi CO2 2.237 ppvb	Emisi CO2 400 ppvb	BLH
		28. Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah Kegiatan Usaha/Jasa yg berpotensi Mencamari Lingkungan	61 perusahaan	70 perusahaan	BLH
		29. Reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan	Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	750 Ha/35.468,66 Ha	850 Ha/45.555 Ha	Dishut
12	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	30. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi kenaikan pendapatan daerah	4,03%	14,21%	Dispenda

Keterangan: *) : data tahun 2014